

**KERJASAMA MARITIM ASIA TENGGARA DALAM
PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL
STUDI KASUS: PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)

**DEWI INDIRA BIASANE
NPM. 0706187672**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JUNI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Dewi Indira Biasane
NPM : 0706187672
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam
Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal;
Studi Kasus: Praktik Penangkapan
Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Sains pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Makmur Keliat (.....)
Ketua Sidang : Dr. Hariyadi Wirawan (.....)
Sekretaris Sidang : Dra. Dwi Ardhanariswari, M.Phil (.....)
Penguji Ahli : Ali Abdullah Wibisono, M.A. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Pasacasarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Makmur Keliat, selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua Program Pascasarjana Hubungan Internasional FISIP UI;
- (2) Bapak Fuad Himawan dan Mas Edwin Suharyadi dari Departemen Kelautan dan Perikanan, yang telah membantu memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Papa, Mama, Tiwi, Mas Hari dan Adhi, serta seluruh keluarga besar Biasane-Taneko dan Tiwow yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
- (4) Karyawan Program Pascasarjana HI-UI; Mbak Iche, Mbak Lina, Pak Udin dan Mas Adi, yang selalu siap membantu selama perkuliahan;
- (5) Teman-teman SP dan keluarga dan teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2002;
- (6) Detriwi Dancer dan teman-teman penari lainnya. *Keep up the good work!*

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan sehingga pengerjaan tesis dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.

Jakarta, 29 Juni 2009

Dewi Indira Biasane

ABSTRAK

Nama : Dewi Indira Biasane
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)

Tesis ini membahas tentang upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui kerangka regional, yaitu *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region*. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dengan latar belakang bahwa kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di WPPRI semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana metode akan menjelaskan permasalahan yang dianalisis melalui penjelasan hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel *independent* dan *dependent* melalui pengajuan hipotesis. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengapa praktik penangkapan ikan ilegal masih terjadi dan bahkan meningkat di contoh kasus WPPRI, pada saat RPOA-IUU *Fishing* diberlakukan, yang menjadi pertanyaan dan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah RPOA-IUU *Fishing* belum dapat menjadi sebuah rejim perikanan yang kuat karena belum memasukkan variabel penyelesaian sengketa (*settlement dispute*) di dalam kesepakatannya. Apabila ada sengketa yang terjadi berhubungan dengan praktik penangkapan ikan ilegal (contohnya, tertangkapnya kapal penangkap ikan asing di suatu wilayah negara pantai), maka penyelesaian sengketa tersebut masih berada dalam kerangka hukum laut internasional atau hukum nasional negara pantai. RPOA-IUU *Fishing* juga belum dapat menjadi sebuah rejim yang kuat karena dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara masih menyimpan potensi konflik mendasar, yaitu masalah delimitasi batas maritim. Sampai saat ini, beberapa negara masih mempersoalkan batas-batas negaranya yang bersinggungan dengan negara lain. Delimitasi batas maritim penting adanya mengingat batas negara sangat diperlukan dalam penetapan batas-batas perikanan suatu negara yang berkaitan dengan sumber daya perikanan yang terkandung di dalam wilayah laut tersebut. Upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal juga menemui kendalanya karena beberapa negara anggota RPOA-IUU *Fishing* sampai sekarang masih belum meratifikasi beberapa *key instruments*, seperti UNCLOS dan UN *Fish Stock Agreement*. Dengan belum diratifikasinya *key instruments* seperti diatas, maka perilaku negara-negara belum dapat diatur oleh ketentuan-ketentuan internasional.

Hasil penelitian merekomendasikan bahwa rejim RPOA-IUU *Fishing* perlu membuat satu konsep penyelesaian sengketa (*settlement dispute*) dalam kesepakatannya, karena karakteristik praktik penangkapan ikan ilegal menyimpan potensi konflik yang memerlukan sebuah konsep penyelesaian sengketa. Delimitasi batas maritime negara juga harus diselesaikan antar negara-negara yang belum menemukan kesepakatan karena mempengaruhi hak atas sumber daya perikanan yang terkandung dalam suatu perairan tersebut. Rekomendasi lain yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepatutnya meratifikasi *international key instruments* yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional, dimana dengan ratifikasi tersebut maka negara secara sadar berkomitmen dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal.

Kata kunci: kerjasama maritim, praktik penangkapan ikan ilegal.



ABSTRACT

Name : Dewi Indira Biasane
Study Programm : International Relation
Tittle : Southeast Asia Maritime Cooperation on Tackling Efforts
Illegal Fishing; Case Study: Illegal Fishing in Fisheries
Management Area of Republic of Indonesia

The focus of this study is the efforts on combating illegal fishing through the regional cooperation, *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region*. This research shall study one case which is happen in the Fisheries Management Area of Republic of Indonesia. This research will be an descriptive-analitical research, which is using an explanation how the problem analized through independet and dependent variable with hypotesys. This research would explain why illegal fishing still happen and even higher in Indonesian fishing area, when RPOA implemented.

The researcher found out that RPOA hasn't be a strong fisheries regime yet because there was one variable that hasn't accommodated yet by RPOA, which is settlement dispute variable. If there was a fisheries dispute, countries will solve these problems by using their own regulations or by using international regulation instruments. The other cause RPOA still hasn't be a strong fisheries regime because countries over Southeast Asia still kep the potential conflict, which is the delimitation of maritime border. Delimitation of maritime border become important in order to get a border of country. The efforts of combating illegal fishing is also met difficulty when countries, nowadays, still hasn't ratified the international key instruments.

The researcher suggest that RPOA as a fishries rezime should arrange concept of settlement dispute. Concept of settlement dispute become an important variable because the characteristic of illegal fishing itself kept an potensisl conflict. Other suggestion is the delimitation of border in the Southeast Asia and countries over Southeast Asia should ratified the international key instruments, that has been organized in international arrangements. By ratifying those insternational key instruments, countries show their commitment in efforts to combating illegal fishing in the region.

Key words: maritime cooperation, illegal fishing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH		v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA		vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS		viii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR LAMPIRAN		xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN		xiv
1. PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Pokok Permasalahan	6
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.4	Manfaat Penelitian	8
1.5	Tinjauan Pustaka	8
1.6	Kerangka Pemikiran	10
1.7	Hipotesa	18
1.8	Asumsi	18
1.9	Metode Penelitian	18
1.10	Signifikansi Penelitian	19
1.11	Sistematika Pembabakan Laporan	20
2. DIMENSI PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN ILEGAL		22
2.1	Definisi, Nilai dan Implikasi Praktik Penangkapan Ikan Ilegal Global	22
	2.1.1 Definisi Praktik Penangkapan Ikan Ilegal dalam Ketentuan Internasional	22
	2.1.2 Nilai Praktik Penangkapan Ikan Ilegal dalam Skala Global dan Regional	34
	2.1.3 Implikasi Praktik Penangkapan Ikan Ilegal	38
2.2	Kondisi Perikanan Indonesia	40
2.3	Praktik Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	44
2.4	Urgensi Upaya Penanggulangan Praktik Penangkapan Ikan Ilegal ..	54
3. REJIM KERJASAMA PERIKANAN REGIONAL PLAN OF		

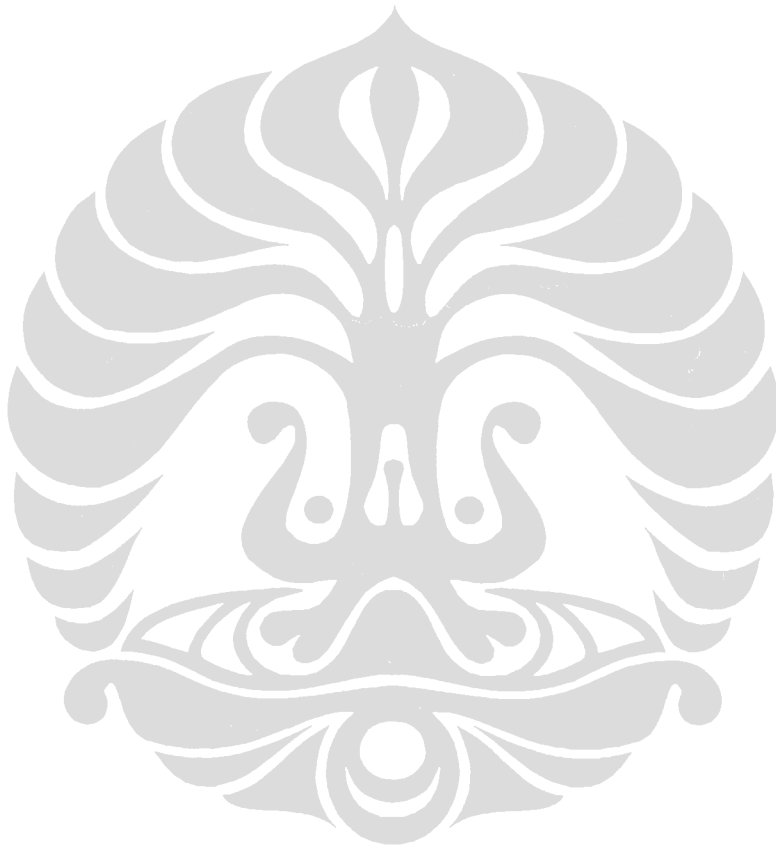
<i>ACTION (RPOA) TO PROMOTE RESPONSIBLE FISHING INCLUDING COMBATING ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING</i>		58
3.1	Respon Masyarakat Internasional dalam Menanggulangi Praktik Penangkapan Ikan Ilegal	58
3.2	Upaya Regional Penanggulangan Praktik Penangkapan Ikan Ilegal Asia Tenggara melalui RPOA	59
4. REJIM RPOA-IUU <i>FISHING</i> SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN ILEGAL		75
4.1	Faktor Pemicu Terjadinya Praktik Penangkapan Ikan Ilegal di Indonesia	75
4.2	Konsep Upaya Penanggulangan Praktik Penangkapan Ikan Ilegal ..	77
4.3	Upaya Penanggulangan Praktik Penangkapan Ikan Ilegal melalui Rejim RPOA	81
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		104
5.1	Kesimpulan	104
5.2	Rekomendasi	106
DAFTAR PUSTAKA		110
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Presentase Kapal yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)	5
..		
Tabel 2.1	Status Stok Sumber Daya Ikan di Samudera Pasifik	30
.....		
Tabel 2.2	Potensi Sumber Daya Ikan tahun 2005	42
.....		
Tabel 2.3	Potensi Sumber Daya Ikan dan Tingkat Pemanfaatannya menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)	43
.....		
Tabel 3.1	Ketentuan Internasional terhadap Praktik Penangkapan Ikan Ilegal	59
.....		
Tabel 3.2	Perkembangan dan Agenda RPOA-IUU <i>Fishing</i> tahun 2006 – 2009	69
.....		
Tabel 4.1	Karakteristik Praktik Penangkapan Ikan Ilegal di Kawasan Asia Tenggara	83
.....		
Tabel 4.2	Contoh Terjadinya Praktik Penangkapan Ikan Ilegal di Kawasan Asia Tenggara	84
.....		
Tabel 4.3	Ratifikasi/Aksesi/Penerimaan terhadap <i>Key Instruments</i>	101
.....		

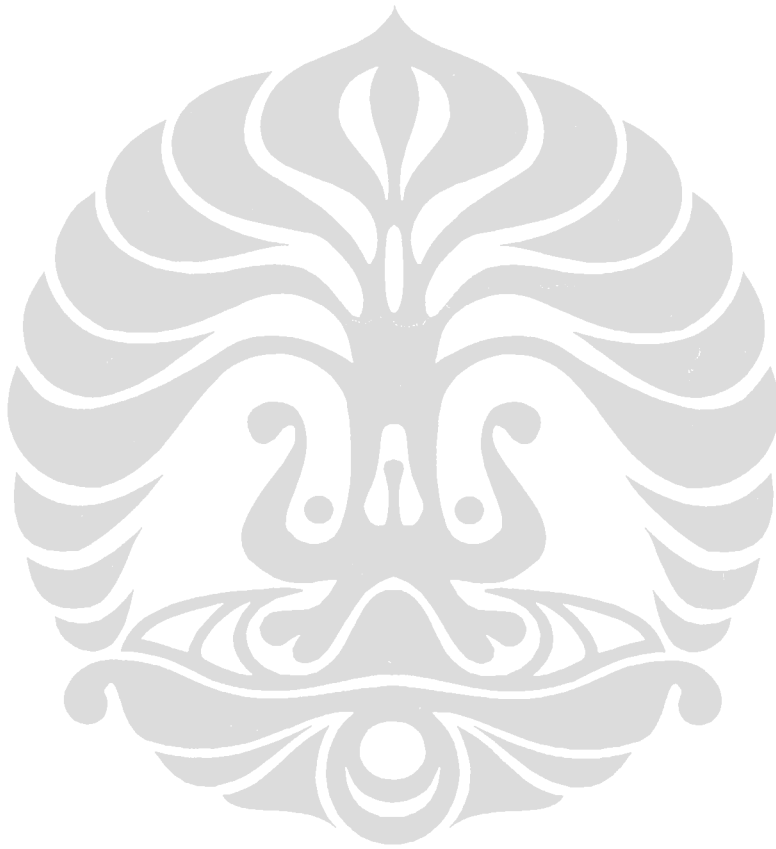
DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Masuknya Pelaku Praktik Penangkapan Ikan Ilegal dari
Berbagai Negara ke Perairan Indonesia 52
.....



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region
- Lampiran 2 Joint Ministerial Statement: Regional Ministerial Meeting on Promoting Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APEC Fisheries Working Group	=	Organisasi dalam APEC yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perikanan, khususnya penangkapan ikan di kawasan Asia Pasifik
DDL	=	Daya Dukung Lingkungan
FAO	=	Food and Agriculture Organization
IUU Fishing	=	Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Diartikan sebagai praktik penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur
JTB	=	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan. Diartikan sebagai perhitungan secara sistematis jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap, setelah memperhatikan tingkat regenerasi sumber daya ikan. JTB ditetapkan oleh pemerintah otoritas pemegang kedaulatan dan hak berdaulat atas sumber daya ikan yang berada di wilayah perairannya
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
MSY	=	Maximum Sustainable Yield (nilai potensi lestari). Diartikan sebagai nilai perikanan yang potensial untuk dimanfaatkan di perairan suatu negara
Overfishing	=	Penangkapan ikan secara berlebihan
PBB	=	Perserikatan Bangsa-bangsa
RFMO	=	<i>Regional Fisheries Management Organization</i> . Diartikan sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perikanan, yang beranggotakan negara-negara pantai yang memiliki sumber daya ikan yang perlu dijaga keberlangsungannya
TOC	=	Transnational Organized Crime
UNCLOS	=	United Nations Convention on The Law of the Sea

VMS	=	Vessel Monitoring System
WPPRI	=	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Diartikan sebagai wilayah perairan Republik Indonesia yang diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, yang meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia
ZEE	=	Zona Ekonomi Eksklusif
ZEEI	=	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

